



**BUPATI HALMAHERA UTARA
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA
NOMOR 68 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang No 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6393);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000, tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan ANgggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2011 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 51);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 54);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Sejumlah :

(1) Pendapatan	Rp.1.183.063.378.364,00
(2) Belanja	Rp.1.219.567.650.051,00
Surplus/(Defisit)	<u>Rp.(36.504.271.687,00)</u>
(3) Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 77.883.582.031,00
b. Pengeluaran	Rp. 41.379.310.344,00

Pembiayaan Netto	<u>Rp.36.504.271.687,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- Pendapatan asli daerah Rp.130.744.850.930,00
 - Pendapatan transfer Rp.947.350.527.434,00
 - Lain-Lain pendapatan daerah yang sah Rp.104.968.000.000,00
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- Pajak Daerah Rp.46.260.571.452,00
 - Retribusi Daerah Rp. 6.415.066.000,00
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 2.000.000.000,00
 - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp.76.069.213.478,00
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- Pendapatan transfer Pemerintah pusat Rp. 855.771.454.000,00
 - Pendapatan transfer Antar daerah Rp. 91.579.073.434,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- Pendapatan Hibah Rp. 104.968.000.000,00
 - Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Rp. 0,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- Belanja Operasi Rp.811.601.248.384,00
 - Belanja Modal Rp.248.299.365.567,00
 - Belanja Tidak Terduga Rp. 7.500.000.000,00
 - Belanja Transfer Rp.152.167.036.100,00
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- Belanja Pegawai Rp.292.015.533.942,00
 - Belanja Barang dan Jasa Rp.450.410.855.542,00
 - Belanja Bunga Rp. 10.200.000.000,00

- d. Belanja Hibah Rp. 57.897.608.900,00
- e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.077.250.000,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Modal Tanah Rp. 1.582.000.000,00
- b. Belanja Modal Peralatan Mesin Rp. 78.232.553.484,00
- c. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Rp. 34.921.533.790,00
- d. Belanja Modal Jalan, dan Irigasi Rp. 132.165.971.293,00
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 1.397.307.000,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat huruf c terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Tidak Terduga Rp. 7.500.000.000,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat huruf d terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 152.167.036.100,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan Rp. 77.883.582.031,00
- b. Pengeluaran Rp. 41.379.310.344,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan

- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 77.883.582.031,00
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 0,00
- c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman daerah Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan

- a. Penyertaan Modal Daerah Rp. 0,00
- b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Rp. 41.379.310.344,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara ini terdiri dari:

1. Lampiran I. Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II. Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V. Daftar Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumidan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX. Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

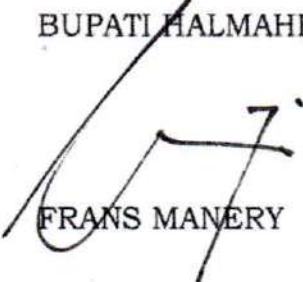
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Ditetapkan di Tobelo

Pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI HALMAHERA UTARA,



FRANS MANERY

Diundangkan di Tobelo

Pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,



ERASMUS JOSEPH PAPILAYA

(Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 Nomor).

KABUPATEN HALMAHERA UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	130.744.850.930
4.1.01	Pajak Daerah	46.260.571.452
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	972.571.452
4.1.01.04.01	Pajak Air Permukaan	972.571.452
4.1.01.04.01.0001	Pajak Air Permukaan	972.571.452
4.1.01.06	Pajak Hotel	650.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	500.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	500.000.000
4.1.01.06.04	Pajak Gubuk Pariwisata	150.000.000
4.1.01.06.04.0001	Pajak Gubuk Pariwisata	150.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	5.403.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	205.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	205.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.535.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.535.000.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.663.000.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.663.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	110.000.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	102.000.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	102.000.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	2.000.000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	2.000.000
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	6.000.000
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	6.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	550.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	520.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	520.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	25.000.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	25.000.000
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	5.000.000
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	5.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	15.100.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	10.000.000.000
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	10.000.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.100.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.100.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	75.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	75.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	75.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.800.000.000
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	5.850.000.000
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	5.850.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	950.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	950.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.500.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	3.500.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	3.500.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.100.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	10.600.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	10.600.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	2.500.000.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	2.500.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	6.415.066.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	3.765.066.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.452.066.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	3.452.066.000

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	300.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	300.000.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	13.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	13.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	350.000.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	300.000.000
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	300.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	50.000.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	50.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.300.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.000.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	2.000.000.000
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	100.000.000
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	100.000.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	100.000.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	100.000.000
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	100.000.000
4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	100.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.000.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.000.000.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.000.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	76.069.213.478
4.1.04.05	Jasa Giro	1.000.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	500.000.000
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	500.000.000
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	500.000.000
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	8.575.000.000
4.1.04.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	8.500.000.000
4.1.04.12.10.0001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	8.500.000.000
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	75.000.000
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	75.000.000
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	50.000.000
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	50.000.000
4.1.04.13.03.0004	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan	50.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	55.000.000.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	55.000.000.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	55.000.000.000
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	10.844.213.478
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	10.844.213.478
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	10.844.213.478
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	947.350.527.434
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	855.771.454.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	710.733.417.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	51.786.213.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	10.776.559.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	7.751.753.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	19.922.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	28.342.938.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.351.876.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	3.543.165.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	469.884.148.000

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.02.0001	DAU	422.049.892.000
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	47.834.256.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	81.327.707.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.000.182.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	9.277.970.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	5.930.407.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	401.915.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	2.960.000.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	22.756.631.000
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	286.709.000
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	38.713.893.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	107.735.349.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	32.708.320.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.330.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	20.492.948.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.678.500.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	5.539.268.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	5.252.220.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	5.000.960.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	29.160.059.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	521.700.000
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.963.999.000
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	648.575.000
4.2.01.05	Dana Desa	145.038.037.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	145.038.037.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	145.038.037.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	91.579.073.434
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	91.579.073.434
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	91.579.073.434
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.097.596.316
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.707.237.570
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	73.898.815.555
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	750.000.000
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.125.423.993
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	104.968.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	104.968.000.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	4.968.000.000
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	4.968.000.000
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	4.968.000.000
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	100.000.000.000
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	100.000.000.000
4.3.01.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	100.000.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	0
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	0
	Jumlah Pendapatan	1.183.063.378.364
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	811.601.248.384
5.1.01	Belanja Pegawai	292.015.533.942
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	184.688.800.136
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	130.717.476.354
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	126.824.224.029
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	3.893.252.325
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	13.896.882.645

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	13.351.043.427
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	545.839.218
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.685.234.832
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.685.234.832
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.666.424.337
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.305.026.637
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	361.397.700
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.565.779.173
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.426.067.923
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	139.711.250
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	9.942.899.404
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	9.458.709.402
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	484.190.002
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	162.547.146
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	162.547.146
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.387.353
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.333.028
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	54.325
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	10.956.152.574
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.667.814.490
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	288.338.084
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	471.624.078
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	457.618.039
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	14.006.039
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.230.453.494
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.188.436.099
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	42.017.395
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	387.938.746
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	387.938.746
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	60.233.631.508
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	48.157.143.844
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	47.805.561.826
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	351.582.018
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.731.480.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.704.480.000
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	27.000.000
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	7.965.807.664
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	7.965.807.664
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	379.200.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	379.200.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	35.028.219.452
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.483.500.000
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	25.000.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	270.150.000
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	5.500.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	27.500.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	435.000.000
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	350.000
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	290.000.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	175.000.000
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	255.000.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	125.650.000
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	15.000.000
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	650.000
5.1.01.03.02.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	5.000.000
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000.000
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	100.000.000

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	20.492.948.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	20.492.948.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	5.539.268.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	5.539.268.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.678.500.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.678.500.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.378.160.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.115.460.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.070.700.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	192.000.000
5.1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	3.330.193.452
5.1.01.03.09.0001	Belanja TPG PPPK	3.330.193.452
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.060.791.350
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	105.338.800
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	105.338.800
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	101.150.000
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	101.150.000
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	11.510.100
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	11.510.100
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	79.048.200
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	79.048.200
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.150.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.150.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	84.231.000
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	84.231.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.837.338.250
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	79.238.250
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	5.000.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	22.100.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.731.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.200.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.200.000.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	280.770.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	280.770.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	402.491.496
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.453.894
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.453.894
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.344.596
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.344.596
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.853.054
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.853.054
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	744
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	744
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	230.599.944
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	230.599.944

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.316
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.316
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402.948
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402.948
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.410.855.542
5.1.02.01	Belanja Barang	106.366.491.703
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	106.353.871.703
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	600.823.800
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	742.808.600
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.397.743.625
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	306.000.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	11.858.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	93.410.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.286.589.408
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	762.907.500
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	70.898.900
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	300.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.859.113.790
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.750.318.421
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.895.893.292
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	375.811.740
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	207.400.300
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.975.971.402
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.016.651.020
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	575.733.600
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	253.490.400
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	238.023.200
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	289.640.400
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	11.576.751.783
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.180.166.649
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	18.830.326.400
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	20.813.245.625
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.404.377.600
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	2.952.400
5.1.02.01.01.0048	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi	20.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.088.532.748
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	91.027.500
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	7.100.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	60.318.500
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	351.747.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	522.218.700
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	61.709.000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	1.694.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	80.868.200
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	75.249.900
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	75.665.300
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	98.833.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	12.620.000
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	5.000.000
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	7.620.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	190.606.983.902
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	106.906.184.979

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.452.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.533.684.500
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.054.350.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	127.400.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	1.950.000
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	83.250.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	445.000.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	530.200.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	39.017.028.926
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	72.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.057.440.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	434.560.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	427.500.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	14.356.657.400
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	613.500.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.743.400.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.094.754.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.099.402.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	678.940.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	202.300.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	123.750.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	161.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	36.000.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	171.063.011
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	165.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	75.900.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	188.322.500
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.658.323.220
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.005.050.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.355.408.022
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	40.975.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	430.200.000
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	686.718.400
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	539.718.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	243.440.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	15.151.332.748
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	14.149.100.000
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	892.640.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	48.471.984
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	61.120.764
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	24.925.501.800
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.682.800.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.215.600.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	102.000.000
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	30.000.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	530.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	932.689.000
5.1.02.02.04.0204	Belanja Sewa Alat Kedokteran Umum	18.311.692.800
5.1.02.02.04.0344	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	25.720.000
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	50.000.000
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	45.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.418.014.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	670.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.201.000.000
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	16.064.000
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	90.000.000
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	10.000.000

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.05.0039	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan II	35.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	2.335.950.000
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	60.000.000
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	104.550.000
5.1.02.02.06.0127	Belanja Sewa Jaringan Telepon di atas Tanah	104.550.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	28.696.379.375
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	1.452.410.025
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	9.321.716.800
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	144.213.000
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	800.000.000
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	270.000.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	2.150.000.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	5.653.266.000
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	100.000.000
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	1.200.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.158.775.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	2.337.831.550
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	400.000.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	2.858.167.000
5.1.02.02.08.0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	850.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.290.000.000
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	80.000.000
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	100.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.110.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	358.400.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	275.000.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	83.400.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.756.621.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.962.221.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	959.400.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	835.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	35.584.816.430
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.634.999.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	705.436.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	657.170.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	154.160.000
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	206.330.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.240.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	289.750.000
5.1.02.03.02.0195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	30.150.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	150.000.000
5.1.02.03.02.0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	119.991.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	251.745.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	60.027.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	23.596.517.430
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.056.134.165
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	100.000.000
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	531.390.000
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	7.800.710.600
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	200.000.000
5.1.02.03.03.0016	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	150.000.000
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	2.871.882.665
5.1.02.03.03.0019	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan	198.000.000
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	900.000.000
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	150.000.000
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	7.000.000.000
5.1.02.03.03.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	638.400.000

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.323.300.000
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	3.998.300.000
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	400.000.000
5.1.02.03.04.0023	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	400.000.000
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	400.000.000
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.600.000.000
5.1.02.03.04.0068	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	800.000.000
5.1.02.03.04.0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	1.200.000.000
5.1.02.03.04.0074	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	200.000.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	325.000.000
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	30.000.000
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	30.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	61.962.212.067
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	61.765.388.300
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39.760.952.200
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.754.056.100
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	250.380.000
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	196.823.767
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa, ÆLuar Negeri	196.823.767
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	890.351.440
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	661.900.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	300.250.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	400.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	361.250.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	228.451.440
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	173.451.440
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	55.000.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	55.000.000.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	55.000.000.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	55.000.000.000
5.1.03	Belanja Bunga	10.200.000.000
5.1.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	10.200.000.000
5.1.03.03.05	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	10.200.000.000
5.1.03.03.05.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	10.200.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	57.897.608.900
5.1.05.04	Belanja Hibah kepada BUMD	199.800.000
5.1.05.04.01	Belanja Hibah Uang kepada BUMD	199.800.000
5.1.05.04.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada BUMD	199.800.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	23.598.883.900
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	17.284.930.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.136.750.000
5.1.05.05.01.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.148.180.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.505.000.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.505.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.154.500.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.154.500.000
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	654.453.900
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	654.453.900
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	32.708.320.000
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	21.839.305.298
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	21.839.305.298
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	10.869.014.702
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	10.869.014.702
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.390.605.000

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.390.605.000
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.390.605.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.077.250.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.038.750.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.038.750.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.038.750.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	20.000.000
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	20.000.000
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	20.000.000
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	18.500.000
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	18.500.000
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	18.500.000
5.2	BELANJA MODAL	248.299.365.567
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.582.000.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.582.000.000
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	1.075.000.000
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	1.075.000.000
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	507.000.000
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	507.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.232.553.484
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	27.614.400
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	27.614.400
5.2.02.01.03.0013	Belanja Modal Peralatan Selam	27.614.400
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	10.252.358.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	9.402.358.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.536.360.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	449.538.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	6.416.460.000
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	850.000.000
5.2.02.02.03.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	850.000.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	25.915.200
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	19.965.000
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	19.965.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	5.950.200
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	5.950.200
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	737.836.150
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	737.836.150
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	737.264.950
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	571.200
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.420.458.885
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.661.935.600
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	270.919.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.391.016.600
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.582.226.285
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	308.210.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	252.586.500
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	715.635.450
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	34.170.380
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.134.488.875
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	137.135.080
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	176.297.000
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	96.800.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	79.497.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	196.654.700
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	139.419.100
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	37.162.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	102.257.100

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	57.235.600
5.2.02.06.02.0003	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	21.939.800
5.2.02.06.02.0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	18.634.000
5.2.02.06.02.0007	Belanja Modal Alat-Alat Sandi	16.661.800
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	38.747.403.037
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	37.218.068.857
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	36.941.720.217
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	7.335.000
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	245.351.340
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	4.209.700
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	19.452.600
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.529.334.180
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.529.334.180
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	222.466.500
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	200.794.500
5.2.02.08.03.0011	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	151.500
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	200.643.000
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	21.672.000
5.2.02.08.04.0006	Belanja Modal Measuring/Testing Device	21.672.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	22.151.788.412
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	11.399.879.812
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.668.607.812
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	8.731.272.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.751.908.600
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	536.819.450
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	1.697.627.150
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	8.517.462.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	278.777.500
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	278.777.500
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	38.452.200
5.2.02.15.02.0002	Belanja Modal Masker	6.050.000
5.2.02.15.02.0003	Belanja Modal Topi Kerja	29.906.000
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	204.369.300
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	171.280.700
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	171.280.700
5.2.02.19.01.0001	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	5.354.500
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	73.586.200
5.2.02.19.01.0003	Belanja Modal Peralatan Senam	52.340.000
5.2.02.19.01.0004	Belanja Modal Peralatan Olahraga Air	40.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.921.533.790
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	32.091.533.790
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	24.993.112.790
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	940.592.558
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	3.992.208.600
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	7.539.431.632
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	9.072.990.000
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	824.200.000
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	790.000.000
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	50.000.000
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	770.954.000
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	90.000.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	257.736.000
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	620.000.000
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	45.000.000
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	7.098.421.000
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	4.704.021.000
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	2.394.400.000

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	2.600.000.000
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	2.600.000.000
5.2.03.02.01.0004	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	2.600.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	230.000.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	230.000.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	230.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	132.165.971.293
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	89.952.309.474
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	81.346.210.374
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	41.879.032.260
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	32.166.539.680
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	1.800.638.434
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	5.500.000.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	8.606.099.100
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	5.756.099.100
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	100.000.000
5.2.04.01.02.0010	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan	250.000.000
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	2.500.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	29.134.286.615
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	700.000.000
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	700.000.000
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	13.660.162.615
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	13.660.162.615
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	260.000.000
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	260.000.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	14.514.124.000
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	14.350.000.000
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	164.124.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	11.800.000.000
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	11.450.000.000
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	11.450.000.000
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	350.000.000
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	350.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	1.279.375.204
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.279.375.204
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.279.375.204
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.397.307.000
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.350.000.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.350.000.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	1.000.000.000
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	350.000.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	19.965.000
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	19.965.000
5.2.05.02.03.0001	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	19.965.000
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	27.342.000
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	27.342.000
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	27.342.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.500.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	152.167.036.100
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	152.167.036.100
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	152.167.036.100
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	52.167.036.100
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	52.167.036.100

KABUPATEN HALMAHERA UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	100.000.000.000
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	100.000.000.000
	Jumlah Belanja	1.219.567.650.051
	Total Surplus/(Defisit)	(36.504.271.687)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	77.883.582.031
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	77.883.582.031
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	77.883.582.031
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	77.883.582.031
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	77.883.582.031
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	77.883.582.031
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	41.379.310.344
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	41.379.310.344
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	41.379.310.344
6.2.03.03.08	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah	41.379.310.344
6.2.03.03.08.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah	41.379.310.344
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	41.379.310.344
	Pembiayaan Netto	36.504.271.687
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Halmahera Utara



Frans Manery